

**PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) KELOMPOK BISNIS DAN
MANAJEMEN KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi
Pendidikan sebagai salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh :

RENNY SRI WAHYUNI
2005 / 63626

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) KELOMPOK BISNIS
DAN MANAJEMEN KOTA PADANG**

Nama : Renny Sri Wahyuni
NIM : 2005/63626
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, 20 Juli 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dra. Elizar Ramli, M.Pd
NIP. 195502031986022001

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd
NIP. 196412051989031001

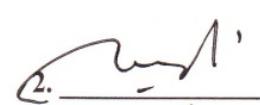
PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Judul : Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang
N a m a : Renny Sri Wahyuni
NIM : 63626
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Padang, 4 Agustus 2011

Tim Penguji

	N a m a	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Elizar Ramli, M.Pd	1. 
2. Sekretaris	: Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd	2. 
3. Anggota	: Dra. Ermita, M.Pd	3. 
4. Anggota	: Dra. Rifma, M.Pd	4. 
5. Anggota	: Nelitawati, S.Pd, M.Pd	5. 

ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang
Penulis : Renny Sri Wahyuni
Pembimbing : 1. Dra. Elizar Ramli, M.Pd
2. Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan penulis tentang pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang, yang ditunjukkan dengan fenomena: adanya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memajukan sekolah, adanya peningkatan kesejahteraan guru dengan melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi guru, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah, dan adanya pengawasan terhadap program pendidikan di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang, yang meliputi: (1) pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan (*controlling agency*), dan (4) pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator (*mediator agency*). Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dilihat dari aspek : (1) memberikan pertimbangan, (2) memberikan dukungan, (3) melakukan pengontrolan, dan (4) menjadi mediator.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang yang berjumlah 34 orang. Alat pengumpul data adalah kuisisioner/angket yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan mencari nilai rata-rata (mean). Sedangkan Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket yang disusun dalam bentuk skala *Likert* dengan alternatif jawaban yaitu selalu (SL), sering (SR), kadang-kadang (KD), jarang (JR) dan tidak pernah (TP). Hasil uji coba angket untuk melihat validitas dengan menggunakan rumus korelasi tata jenjang dengan hasil $\rho_{\text{hasil}}=0,921 > \rho_{\text{tabel}} = 0,641$ dan untuk reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha diperoleh $r_{\text{hasil}} = 0,7604 > r_{\text{tabel}} = 0,641$ dengan $N=15$ pada taraf kepercayaan 99% maka hasilnya adalah valid dan reliabel. Data diolah dengan menggunakan rumus rata-rata (*Mean*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam memberikan pertimbangan berkategori **baik** dengan skor rata-rata **3,89**, (2) pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen

Kota Padang dalam memberikan dukungan berkategori **baik** dengan skor rata-rata **4,04**, (3) pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam melakukan pengontrolan berkategori **baik** dengan skor rata-rata **4,09**, (4) pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam menjadi mediator berkategori **baik** dengan skor rata-rata **4,08**. Jadi secara umum pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang berkategori **baik** dengan skor rata-rata **4,02**.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis aturkan pada Allah SWT, Allah maha besar yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang”**.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini terlaksana berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis pada kesempatan ini sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan permohonan izin penelitian
3. Ibu Dra. Elizar Ramli, M.Pd selaku ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Dr. Ahmad Sabandi, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan waktu kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai
5. Staf Dosen beserta Pegawai Jurusan Administasi Pendidikan yang telah mengajarkan penulis berbagai hal sehingga menambah wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini dan dalam kehidupan akan datang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini
7. Kepala Sekolah dan Pengurus Komite Sekolah SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang atas kerjasama dan bantuannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini

8. Orang tua (khususnya Ibu ku), kakak-kakak ku, serta abang yang mendoakan, memberi nasehat, dorongan, motivasi, dukungan pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Rekan-rekan seangkatan 2005 dan rekan-rekan 2006 yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini. Serta keluarga besar Jurusan Administrasi Pendidikan
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam rangka menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, sekolah tempat penelitian, dan Jurusan Administrasi Pendidikan serta pembaca pada umumnya.

Penulis telah berupaya dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari baik isi maupun penulisan masih belum sempurna. Untuk itu kepada pembaca, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2011

Renny Sri Wahyuni

Nim.63626

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	15

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori.....	16
1. Pengertian Komite Sekolah.....	17
2. Keanggotaan Komite Sekolah.....	18
3. Perangkat Organisasi Komite Sekolah.....	19
4. Struktur Organisasi Komite Sekolah	19
5. Tujuan Komite Sekolah	21
6. Kewenangan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah	23
a. Pola Pembagian Kewenangan	23
b. Wewenang Komite Sekolah	24
c. Akuntabilitas (Tanggung Gugat) Komite Sekolah	25

d. Larangan dan Pengawasan Komite Sekolah	25
7. Tugas Komite Sekolah	26
a. Memberikan Pertimbangan (<i>Advisory Agency</i>)	28
b. Memberikan Dukungan (<i>Supporting Agency</i>)	32
c. Melakukan Pengontrolan (<i>Controlling Agency</i>)	34
d. Menjadi Mediator (<i>Mediator Agency</i>)	35
B. Kerangka Pikir	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	41
B. Defenisi Operasional Variabel	41
C. Populasi	43
D. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	48
B. Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79-100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan di lihat dari aspek pertimbangan tentang perencanaan sekolah	49
2. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dilihat dari aspek pertimbangan tentang pelaksanaan program dan Pengelolaan sumber daya pendidikan	51
3. Rekapitulasi pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan	52
4. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan dilihat dari aspek dukungan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan (SDM).....	53
5. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan dilihat dari aspek dukungan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana .	55
6. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan dilihat dari aspek dukungan terhadap pengelolaan anggaran.....	56
7. Rekapitulasi pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan	57
8. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan dilihat dari aspek pengontrolan terhadap perencanaan pendidikan	58
9. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan dilihat dari aspek pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan.....	59
10. Rekapitulasi pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan	60
11. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator dilihat dari aspek mediator dalam perencanaan sekolah	61

12. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator dilihat dari aspek mediator dalam pelaksanaan program	62
13. Rekapitulasi pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator	64
14. Rekapitulasi Skor rata-rata pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
2. Surat Angket Penelitian
3. Petunjuk Pengisian Angket Penelitian
4. Angket Penelitian
5. Rekapitulasi Data Hasil Uji Coba Angket
6. Uji Validitas Angket Penelitian
7. Uji Reliabilitas Angket Penelitian
8. Skor Mentah Hasil Penelitian
9. Tabel Nilai-nilai RHO
10. Tabel Nilai-nilai Chi Kuadrat
11. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNP
12. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Padang
13. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian dari Sekolah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komite sekolah mewadahi partisipasi para *stakeholders* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam komite sekolah, masyarakat/*stakeholders* dapat menyalurkan aspirasi dan prakarsanya dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite sekolah di bentuk berdasarkan pada kebutuhan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara umum, dengan tujuan memberikan bantuan pemikiran dan upaya-upaya lainnya. Dengan adanya kebijakan pembentukan komite sekolah di setiap satuan pendidikan merupakan konsekuensi logis dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan. Karena penyelenggaraan pendidikan yang baik dan efektif adalah melibatkan seluruh unsur *stakeholders* sekolah yang bersangkutan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan *stakeholders* akan sangat membantu pencapaian prestasi dan peningkatan mutu sekolah, karena aspirasi yang berkembang di lingkungan warga yang berkepentingan terhadap sekolah (*stakeholders*), merupakan

support/dukungan dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah menjadi sangat strategis dalam rangka menjembatani antara masyarakat dan pihak sekolah. Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain.

Dilihat dari sifatnya, komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Artinya, tugas komite sekolah berkaitan erat dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sehingga optimalisasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sangat ditentukan juga oleh optimalisasi pelaksanaan tugas komite sekolah.

Menurut Sajidan dalam Hasanah (2008) menyatakan bahwa : dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dimana sekolah melibatkan banyak kalangan untuk bekerja sama mencetak anak didik yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan tujuan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini tersusun dalam tiga pilar, yaitu :

1. Manajemen Pengelolaan sekolah

2. Proses Belajar Mengajar yang menggunakan istilah PAKEM untuk pembelajaran sekarang, yakni pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
3. Adanya Peran Serta Masyarakat (PSM) yang terdiri dari dua unsur, yaitu komite sekolah dan orang tua siswa.

Keberadaan komite sekolah sangat penting sekali pada setiap satuan pendidikan, yaitu sebagai wujud peran serta masyarakat dalam menunjang dunia pendidikan, komite sekolah seharusnya menjadi partner sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi para siswa. Di sekolah yang menerapkan MBS dengan baik, komite sekolah berperan lebih dari sekedar pendamping sekolah. Kalau masyarakat memandang bahwa komite sekolah hanya berfungsi untuk mencari dana bagi pengembangan sekolah, itu salah. Komite sekolah justru berperan untuk mengawal sekolah, terlibat dalam manajemen sekolah seperti pembuatan program dan rencana strategis. Begitu juga dengan orang tua siswa, kalau dulu mereka terkesan menyerahkan semuanya kepada pihak sekolah, sekarang tidak bisa begitu lagi. Orang tua harus ikut berperan aktif dan bekerja sama dengan pihak sekolah jika ingin anaknya mendapat yang terbaik.

Menurut Depdiknas (2002:14) menyatakan tugas komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap satuan pendidikan adalah : “(1) Memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, (2) Memberi dukungan baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) Menjadi pengontrol dalam

rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dan (4) Menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tugas komite sekolah mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap satuan pendidikan, baik sebagai pemberi masukan, dukungan, pengontrolan, maupun sebagai mediator guna terselenggaranya pendidikan disekolah secara optimal. Oleh sebab itu komite sekolah harus dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal, agar penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

SMK Negeri 2 Padang adalah sekolah menengah kejuruan yang bergerak dalam bidang bisnis manajemen, teknologi informasi dan pariwisata. Sebagai sekolah yang mengedepankan mutu dan kualitas pendidikan, SMK Negeri 2 Padang merupakan sekolah SBI Invest dan menjadi Sekolah Model /Percontohan bagi sekolah menengah kejuruan lainnya dan akan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000.

Saat ini SMK N 2 Padang menjadi salah satu SMK yang berstatus Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di antara 90 SMK yang memiliki SBI se-Indonesia. Sedangkan untuk ditingkat Kota Padang, SMK N 2 Padang merupakan satu-satunya SMK yang memiliki status SBI. SMK N 2 Padang, merupakan salah satu SMK unggul di Kota Padang, dengan memiliki berbagai macam prestasi dalam beberapa bidang. Adapun prestasi itu adalah :

1) Pada tahun ajaran 2008-2009 siswa SMK N 2 Padang lulus UN 93,29 %.

Kelulusan siswa SMK N 2 Padang untuk tahun pembelajaran 2008-2009 lulus 93,29%. Dibanding tahun sebelumnya kelulusan ini meningkat

+25%. Hal itu di sebabkan karena meningkatnya partisipasi seluruh stakeholder, mulai dari siswa, guru, pegawai, dan staff pimpinan.

- 2) Guru SMK N 2 Padang lulus sertifikasi angkatan iii, iv, v

Dengan bertambahnya kelulusan guru dalam mengikuti sertifikasi ini, maka semakin meningkatnya mutu pendidikan khususnya di SMK N 2 Padang, dengan harapan akan meningkat juga kesejahteraan dari masing-masing guru. Sampai saat ini sudah lulus sebanyak 26 orang guru SMK N 2 Padang yang telah disertifikasi.

- 3) Siswa SMK N 2 Padang dapat meraih Medali Emas dalam lomba karate tingkat Sumatera Barat yang diadakan oleh Perguruan Karate Lemkari, Inkanas, Inkado, dan Inkai pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2008.

- 4) SMK N 2 Padang memiliki BPR Syari'ah

Setelah meluluskan ribuan alumni dari 53 angkatan siswa sejak tahun 1952 hingga 2008, SMK N 2 Padang tahun ini akan memiliki BPR Syari'ah. Bank tersebut didirikan Ikatan Alumni SMK N 2 Padang untuk menunjang situasi perekonomian Kota Padang, khususnya keluarga besar SMK N 2 Padang.

- 5) Siswa Teknologi Informasi SMK N 2 Padang di terima di STT Telkom Bandung.

Semua prestasi yang di dapat oleh SMK N 2 Padang tersebut, tidaklah terlepas dari adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan seluruh *stakeholder* pendidikan yang terwujud dalam komite sekolah SMK N 2 Padang. Dalam komite sekolah, masyarakat bisa terhimpun dan menyatukan

segala sumber daya yang ada untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.

SMK N 3 Padang merupakan sekolah kelompok bisnis dan manajemen. Sama dengan SMK N 2 Padang, sampai saat ini prestasi teranyar yang dimiliki oleh SMK N 3 Padang adalah ditetapkan sebagai Sekolah Rintisan Standar Internasional (SRSI). Serta tengah menerapkan sistem mutu ISO 9001:2000 dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan *stakeholders* pendidikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk meraih status SRSI tersebut sudah ditentukan syarat-syarat minimalnya, yaitu meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kurikulum yang dipakai, input siswa, dan keterlibatan masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

SMK N 2 dan SMK N 3 Padang, merupakan sekolah kelompok bisnis dan manajemen di kota padang. Kedua sekolah ini merupakan sekolah berstandar internasional yang memiliki berbagai macam prestasi di bidangnya. Semua prestasi itu tidaklah terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan warga sekolah dan *stakeholders* pendidikan. Kedua sekolah ini kalau dinilai secara umum, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk menghasilkan tamatan yang siap memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional dalam lingkungan keahlian bisnis dan manajemen. Dan semua itu bisa tercapai karena adanya kerjasama antara pihak sekolah dengan *stakeholders* pendidikan yang tertuang dalam komite sekolah.

Komite sekolah menjadi mitra kepala sekolah dan para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Komite sekolah yang solid, akan memberikan kontribusi yang besar terhadap mutu pendidikan di sekolah. Dalam penyusunan program sekolah sampai pada evaluasi program, komite sekolah/*stakeholder* yang kompak dan cerdas akan memberikan perubahan yang berarti dalam peningkatan mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Karena jika dilihat dari sudut konsep, sekolah di tempatkan sebagai pelaku utama (*subyek*), yang mana mutu sekolahnya, sebagai produk adanya mutu managerial, umumnya dilihat dari :

- 1) Kualitas konteks lingkungan masyarakat pendukung/pengguna (*external stakeholder*) termasuk sosial – ekonomi - kultur dan geografisnya
- 2) Kualitas input, terutama minat calon siswa dan hasil perekrutan siswa baru
- 3) Kualitas proses belajar mengajar secara menyeluruh
- 4) Kualitas keluaran/lulusan
- 5) Kualitas dampak, suatu nilai tambah kinerja sekolah dan lulusannya bagi tiap-tiap lulusan sendiri dan bagi masyarakatnya.

Seperti prestasi yang telah di raih oleh kedua sekolah tersebut, maka dapat kita lihat kalau kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang bermutu, dan keberhasilan itu di karenakan manajemen sekolahnya yang baik, terutama adanya peran dan fungsi komite sekolah yang menjadi salah satu faktor penting dalam manajemen sekolah tersebut.

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil

siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan financial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Inilah yang dapat dilihat dari keberadaan komite sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang, terciptanya hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi komite sekolah, dan itu semua akan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan di kedua sekolah tersebut, misalnya saja orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah.

Berdasarkan kenyataan di lapangan tentang komite sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang, terlihat adanya hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan *stakeholder* pendidikan di sekolah tersebut, hal ini terlihat selain dari prestasi-prestasi yang sudah disebutkan di atas, juga terlihat adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komite sekolah, misalnya SMK tersebut sudah menjalin kerjasama dengan DUDI (Dunia Usaha dan Industri), BUMN, Perguruan Tinggi, dan Badan usaha terkemuka lainnya dalam melaksanakan Uji Kompetensi dan Praktek Kerja Industri untuk masing-masing Program Keahlian, dan sebagai hasilnya para lulusan SMK itu hampir 80% sudah bekerja dan diserap langsung oleh DUDI, BUMN, PT dan sebagainya.

Jika dilihat secara umum tentang kinerja komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK tersebut, adapun upaya yang telah dilakukan yaitu :

- 1) Adanya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kemajuan sekolah, khususnya dukungan moril dan material. Upaya yang dilakukan oleh komite sekolah adalah dengan melakukan kerja sama dengan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kemajuan pendidikan di sekolah tersebut dan menjaga agar hubungan sekolah dengan masyarakat tetap baik sehingga masyarakat memiliki komitmen untuk tetap bekerja sama dengan sekolah dalam memajukan pendidikan di sekolah
- 2) Adanya peningkatan kesejahteraan guru, yaitu dengan cara memberikan dukungan yang penuh pada guru-guru yang dirasa pantas untuk mendapatkan peningkatan baik kompetensi maupun kesejahteraan, misalnya dengan melakukan pembinaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu dengan cara mengikutkan guru dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan penataran guna menambah pengetahuan dan wawasannya tentang pembelajaran
- 3) Adanya pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran guna menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah, yaitu dengan cara menghimpun bantuan sarana dan prasarana baik dari pemerintah maupun masyarakat

- 4) Adanya pengawasan terhadap program pendidikan di sekolah. Yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja sekolah, untuk melihat sejauh mana program dan kebijakan pendidikan telah terlaksana dengan baik.

Upaya tersebut telah terlaksana dengan baik, hal itu bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMK tersebut, dan itu semua bisa tercapai karena adanya hubungan kerja sama yang baik di antara pihak sekolah dengan komite sekolah SMK tersebut.

Komite sekolah memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hubungan kerja sama yang baik dalam emmajukan pendidikan antara pihak sekolah dengan komite sekolah akan memberikan manfaat yang sangat baik terhadap sekolah tersebut. Hal ini disebabkan karena:

1. Komite sekolah merupakan wujud dari implementasi manajemen berbasis sekolah dalam upaya memajukan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan peserta didik
2. Dengan adanya komite sekolah menjadikan proses pendidikan yang terbuka dan otonom. Pada saat yang sama, kehadirannya membantu masyarakat mengurai pertanyaan masalah dana, manajemen dan kinerja sekolah yang tertutup
3. Komite sekolah merupakan perwakilan dari orang tua siswa, sehingga dalam pelaksanaannya komite sekolah harus berperan aktif dalam menentukan kebijakan sekolah anaknya.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat di katakan bahwa kualitas dan mutu pendidikan pada SMK tersebut adalah baik. Keberhasilan itu tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan *stakeholder* pendidikan yang terwujud dalam komite sekolah SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk mencoba mengungkapkan mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas komite sekolah SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk mengungkapkan mengenai **pelaksanaan tugas komite sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini dari pelaksanaan tugas komite sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang, yaitu :

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komite sekolah bisa memberikan berbagai ide-ide, saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, misalnya tentang kriteria sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan anggaran pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

2. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komite sekolah dapat melakukan berbagai hal yang dapat menunjang kelancaran pendidikan di sekolah, misalnya dengan menghimpun bantuan sarana dan prasarana, menghimpun bantuan dana pendidikan baik dari pemerintah maupun masyarakat
3. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komite sekolah bisa melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja program dan kebijakan pendidikan yang telah diambil oleh sekolah
4. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, komite sekolah merupakan jembatan antara pihak sekolah dengan pemerintah atau masyarakat untuk saling bekerja sama bahu-membahu dalam melakukan peningkatan terhadap pendidikan di sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah tentang :

1. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah dan pengelolaan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang
2. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan, pengelolaan sarana dan

prasarana, dan pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang

3. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang
4. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dibuat suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah dan pengelolaan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan, pengelolaan

sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang?

3. Bagaimana pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang?
4. Bagaimana pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang :

1. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program sekolah dan pengelolaan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang
2. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan, pengelolaan sarana dan

prasarana, dan pengelolaan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang

3. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam melakukan pengontrolan dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang
4. Pelaksanaan tugas komite sekolah dalam menjadi mediator dalam hal perencanaan sekolah, pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait, secara rinci penelitian ini dapat berguna :

1. Sebagai masukan bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang pelaksanaan tugas komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
2. Sebagai masukan bagi Pengawas Pendidikan tentang pelaksanaan tugas komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Sebagai masukan bagi Pengurus Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas di sekolah
4. Kepala Sekolah sebagai manager pendidikan di sekolah.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah sebagai wadah yang berperan mengawasi, mengontrol atas kebijaksanaan-kebijaksanaan di suatu sekolah mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga mempunyai tanggung jawab terhadap tercapainya penyelenggaraan pendidikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan :

“Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah”.

Sedangkan Sapari (2003:2) mengemukakan bahwa : ”komite sekolah ditingkat sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang menjadi jembatan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta dapat mengakomodasi semua tuntutan, ide dan argumentasi masyarakat terhadap kebijaksanaan pendidikan”.

Depdiknas (2002:13) mengatakan bahwa :

“Komite sekolah merupakan suatu lembaga atau lembaga non-profit dan non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders*

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses hasil belajar”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah adalah suatu organisasi yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan secara umum.

2. Keanggotaan Komite Sekolah

Sebagai organisasi yang mempunyai anggaran dasar rumah tangga, masalah anggota dan kepengurusan dan adanya penjabaran uraian tugas yang jelas. Anggota dan pengurus komite sekolah, sebaiknya di bangun berdasarkan kualifikasi keanggotaan.

Menurut Fattah (2004:163), berdasarkan analisis empiris dan teoritis, keanggotaan komite sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Anggota biasa
 1. Perwakilan orang tua siswa berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis
 2. Perwakilan siswa bagi tingkat SMP/SMU/SMK yang dipilih berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis
 3. Tokoh masyarakat yang di sepakati (Ulama, Budayawan, Pemuka Adat)
 4. Pejabat pemerintahan setempat (RT, RW, RK, Kepala Dusun, Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin dan Instansi lain)
 5. Dunia usaha (pabrik, pengusaha jasa, asosiasi)
 6. Pejabat pengendalian pendidikan (Dinas Pendidikan)
 7. Perwakilan forum alumni SD/SMP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri.

- b. Anggota mitra sejajar
 - 1. Kepala sekolah
 - 2. Wakil guru yang dipilih oleh rekan-rekan sejawat di sekolahnya.
- c. Anggota luar sekolah biasa dan kehormatan
 - 1. Seorang anggota masyarakat yang mempunyai perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan dan bersedia membantu dengan sukarela baik bantuan material maupun nonmaterial, secara berkesinambungan sesuai dengan kesediaannya
 - 2. Seseorang anggota masyarakat yang dijadikan figur dan mempunyai perhatian peningkatan kualitas pendidikan dan bersedia membantu dengan sukarela baik berupa bantuan material maupun nonmaterial, secara berkesinambungan sesuai dengan kesediaannya
 - 3. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan dan bersedia membantu dengan sukarela atau ditunjuk oleh komite sekolah berdasarkan imbalan tertentu secara professional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keanggotaan komite terdiri dari orang-orang yang berkepentingan dan memiliki kepedulian terhadap pendidikan, seperti perwakilan orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dunia usaha, pakar pendidikan, organisasi profesi pendidikan, perwakilan siswa dan alumni.

3. Perangkat Organisasi Komite Sekolah

Menurut Suparlan (2007) menyatakan bahwa, perangkat organisasi komite sekolah yang harus ada, yang memungkinkan berjalannya roda organisasi komite sekolah yaitu :

- a) Kepengurusan
Komite sekolah yang terdiri atas personel yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada, dibentuk menjadi sebuah organisasi yang paling tidak terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- b) Struktur Organisasi

Dalam keadaan organisasi Komite Sekolah dengan kegiatan yang lebih kompleks, struktur organisasi dapat lebih diperluas dengan beberapa Ketua Bidang, dan beberapa Seksi.

c) Job Description

Guna menjalankan roda organisasi Komite Sekolah, perlu dibuat job description bagi setiap personel pada setiap jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dalam hal ini job description berupa panduan siapa yang mengerjakan apa dan masing-masing personel bertanggung jawab atas terlaksananya tugas yang diembannya. Terkait dengan job description, juga disusun panduan tata-hubungan antarpersonel.

d) AD/ART

AD/ART merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting. Dalam hal organisasi masih merupakan organisasi yang sederhana dengan kegiatan yang masih terbatas, AD/ART tidak harus ada dulu. Akan tetapi Komite Sekolah tetap harus memiliki panduan berorganisasi, dan roda organisasi berjalan berdasarkan panduan tersebut. Dalam AD/ART atau Panduan Organisasi paling tidak harus diatur mengenai : Dasar, Tujuan, dan Kegiatan dari Komite Sekolah, ketentuan keanggotaan dan kepengurusan (termasuk masa bakti), hak dan kewajiban anggota dan pengurus, ketentuan tentang pengelolaan keuangan, mekanisme pengambilan keputusan, perubahan Panduan Organisasi atau AD/ART, dan pembubaran organisasi.

e) Fasilitas Penunjang

Sebuah organisasi dapat dikatakan mustahil berjalan tanpa didukung oleh fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang sebuah komite sekolah yang paling sederhana adalah adanya meja kerja bagi Ketua Komite di sebuah sekolah.

4. Struktur Organisasi Komite Sekolah

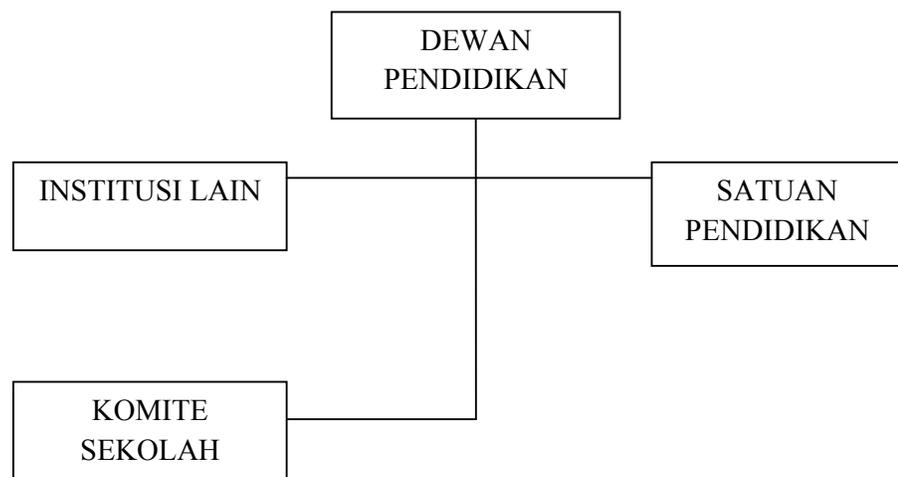
Menurut Hasbullah (2006:99) menyatakan bahwa pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan,

proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

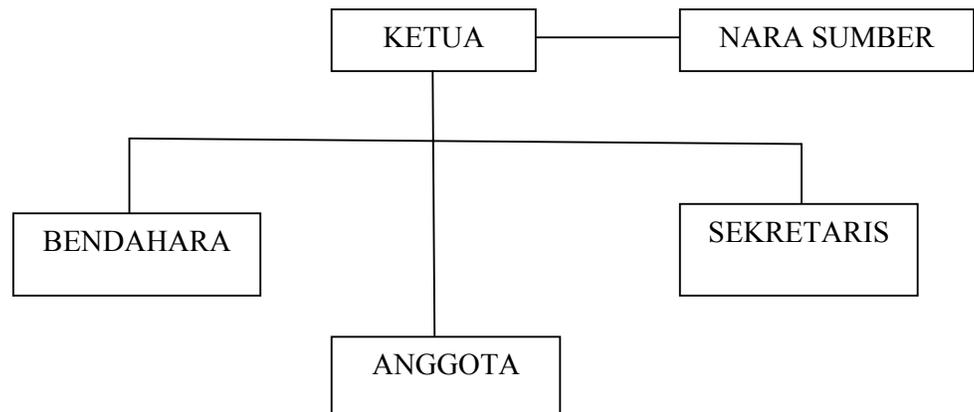
Struktur kepengurusan Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada. Selain itu, dapat pula di angkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi.

Berikut ini struktur organisasi Komite Sekolah :

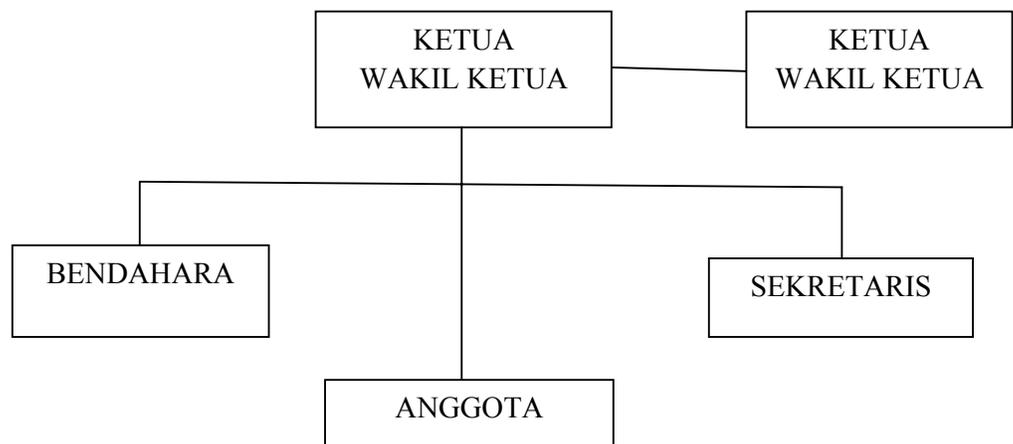
- a. Struktur hubungan Komite Sekolah dengan Instansi terkait ;



- b. Struktur Organisasi Satu Komite Sekolah untuk Satuan Pendidikan



- c. Struktur Organisasi Komite Sekolah untuk beberapa Satuan Pendidikan ;



5. Tujuan Komite Sekolah

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, menjelaskan tujuan dari komite sekolah ini adalah sebagai berikut :

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
- b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- c) Menciptakan kondisi dan suasana yang transparan dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Menurut Fattah (2004:155) menjelaskan tujuan dari pembentukan komite sekolah itu adalah :

- a) Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholders* pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan peserta didik secara proporsional dan terbuka
- b) Mewadahi partisipasi para *stakeholders* untuk turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proporsional
- c) Mewadahi partisipan baik individu maupun kelompok sukarela, pemerhati atau pakar pendidikan yang peduli kepada kualitas pendidikan, secara proporsional dan professional selaras dengan kebutuhan sekolah
- d) Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dan kewenangan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat serta meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

6. Kewenangan Tugas dan Fungsi Komite Sekolah

a. Pola Pembagian Kewenangan

Menurut Fattah (2004:159) menyatakan bahwa, komite sekolah dalam konteks MBS harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat yang berkenaan dengan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada. Ada pun pola pembagian dapat diformulasikan sebagai berikut:

- 1) Pembagian kewenangan dan keanggotaan komite ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilandasi dengan semangat kesepakatan, kemitraan dengan sekolah
- 2) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus komite ditetapkan berdasarkan AD/ART yang dilandasi semangat kesepakatan, kemitraan dengan sekolah
- 3) Posisi peran anggota dan pengurus komite sekolah berdasarkan job deskripsi masing-masing sesuai dengan peran dan fungsi anggota dan pengurus
- 4) Wakil pihak sekolah (Kepala dan Guru) yang duduk di dalam komite sekolah, merupakan anggota mitra kerja sejajar yang mempunyai peran dan wewenang profesionalisme kependidikan,

dilandasi sikap terbuka, akomodatif, responsive dan interaktif terhadap komite sekolah.

b. Wewenang Komite Sekolah

Menurut Fattah (2004:160) menyatakan bahwa, komite sekolah yang dibentuk sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah dalam posisinya sebagai mitra kerja sekolah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Menetapkan AD/ART komite
- 2) Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategis pengembangan sekolah
- 3) Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah
- 4) Bersama-sama sekolah membahas untuk kesejahteraan personil sekolah
- 5) Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS
- 6) Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah
- 7) Mengkaji dan menilai kinerja sekolah
- 8) Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk promosi, dan diajukan kepada pihak berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten
- 9) Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain sesuai dengan persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum untuk promosi, dan ditunjuk oleh pihak berwenang dalam hal ini Kepala Daerah melalui argumentasi dan rasional yang disepakati oleh pihak komite sekolah
- 10) Merekomendasikan kepala sekolah atau guru yang melanggar etika profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten.

c. Akuntabilitas (Tanggung Gugat) Komite Sekolah

Menurut Fattah (2004:162) menyatakan bahwa, komite sekolah selaras dengan wewenang dan fungsinya maka akuntabilitas adalah :

- 1) Komite sekolah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholders* secara periodik, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran program sekolah
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran), kepada masyarakat dan pemerintahan setempat.

d. Larangan dan Pengawasan Komite Sekolah

Merupakan Suparlan (2010) menyatakan bahwa dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ini juga terdapat ketentuan tentang larangan dan pengawasan. Kegiatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

- 1) Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan
- 2) Memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/wali murid di satuan pendidikan

- 3) Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung
- 4) Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung maupun tidak langsung
- 5) Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Larangan ini harus dimaknai sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari kemungkinan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ikut-ikutan menumbuhsuburkan praktik korupsi dan KKN dalam pelaksanaan peran dan tugasnya untuk meningkatkan layanan pendidikan. Jangan sampai terjadi karena dengan alasan untuk melaksanakan peran dan tugasnya, lalu Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga melakukan cara-cara yang penuh nuansa koruptif dan KKN tersebut.

7. Tugas Komite Sekolah

Menurut Rofik (2010), menyatakan bahwa komite sekolah memiliki tugas pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah harus mampu menciptakan kondisi sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Menurut Suhardi (2009) berdasarkan bahan sosialisasi tentang penjabaran peran dan fungsi komite sekolah dari dewan Pendidikan, peran

komite sekolah adalah : pemberi pertimbangan (*advisory*), pendukung (*supporting*), pengontrol (*controlling*), dan mediator.

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Lembaga ini memiliki kedudukan yang kuat, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 56 (3) menyebutkan bahwa :

“Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.

Rumusan dalam pasal 56 (3) tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang bidang garapan komite sekolah, yakni peningkatan mutu pelajaran pendidikan. Selain itu pasal tersebut juga menyebutkan tiga peran komite sekolah, ialah :

- a) Memberikan pertimbangan dan arahan
- b) Dukungan tenaga, sarana dan prasarana
- c) Pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, tugas komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah :

“(1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, dan (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan”.

Selanjutnya akan di uraikan berikut ini :

a) Memberikan Pertimbangan (*advisory agency*)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (2002:7) diuraikan bahwa : ”Komite sekolah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pertimbangan dan masukan terhadap pencapaian tujuan pendidikan”.

Sapari (2003:37) mengemukakan bahwa : “Kegiatan seperti memberikan pertimbangan kepada Bupati, Walikota, dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional mengenai permohonan keringanan atau pembebasan kewajiban membayar SPP yang diajukan secara aktif oleh wajib belajar merupakan salah satu tugas komite sekolah”.

Tugas dan fungsi komite sekolah sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah, menurut Hartono (2010), menyatakan bahwa : komite dapat memberikan masukan, pertimbangan (*advisory agency*) dan rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai :

- 1) Kebijakan dan program pendidikan
- 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
- 3) Kriteria tenaga kependidikan
- 4) Kriteria kinerja satuan pendidikan

- 5) Kriteria fasilitas pendidikan
- 6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

Menurut Ngadino (2009) tugas komite sekolah dalam memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, yaitu :

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumber daya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah, kemudian menganalisa sebagai bahan masukan, pertimbangan, rekomendasi kepada sekolah/satuan pendidikan
2. Menyampaikan masukan, rekomendasi dan pertimbangan secara tertulis kepada sekolah
3. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan KTSP
4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran
5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).

Sedangkan menurut Ace Suryadi yang dikutip oleh Hasbullah (2006:96), menyebutkan beberapa indikator dari tugas komite sekolah dalam memberikan pertimbangan (*advisory agency*), yaitu:

- a. Pertimbangan tentang perencanaan Sekolah
 1. Membantu sekolah melakukan identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat

Sumber daya pendidikan yaitu semua faktor dan aspek yang dapat di manfaatkan oleh pengelola pendidikan untuk dapat melaksanakan kegiatan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang termasuk dalam kelompok sumber daya pendidikan itu :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Yaitu tentang sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan yaitu pendidik seperti guru maupun tenaga kependidikan seperti tenaga administratif, yang berkenaan dengan pengadaan, peningkatan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga pendidik (guru dan non guru).

b. Sumber Daya Informasi (SDI)

Yaitu tentang saran/informasi yang diberikan oleh masyarakat/orang tua tentang kebutuhan/pelayanan pendidikan.

c. Sumber Daya Fisik (SDF)

Yaitu tentang materi/fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran proses pendidikan.

d. Sumber Daya Keuangan (SDK)

Yaitu tentang bagaimana memperoleh dan menetapkan sumber-sumber dana.

2. Memberikan masukan/pertimbangan untuk RAPBS

Masukan/pertimbangan terhadap pembahasan dan penetapan RAPBS, yaitu tentang berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan, serta penggunaan anggaran untuk keperluan pendidikan di sekolah.

b. Pertimbangan tentang pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan

1. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan (manajemen) pendidikan di sekolah

Menurut Akbar (2010), yang termasuk kedalam manajemen pendidikan di sekolah yaitu :

- a. Kurikulum, yaitu memberi pertimbangan dalam hal pengembangan kurikulum muatan lokal dan penambahan waktu belajar di luar jam wajib.
- b. Ketenagaan, yaitu memberi pertimbangan tentang perencanaan dan pengadaan guru dan pegawai/tenaga pendukung yang dapat diperbantukan di sekolah.
- c. Sarana dan prasarana, yaitu memberi pertimbangan tentang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah.
- d. Keuangan, yaitu memberi pertimbangan dalam hal pemanfaatan dana sekolah
- e. Kesiswaan, yaitu memberi pertimbangan meliputi tentang pengembangan minat dan bakat siswa, dan pertimbangan tentang pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa dari kalangan ekonomi lemah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah suatu badan yang juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan sekolah guna pencapaian tujuan

pendidikan secara umum dan tujuan sekolah yang bersangkutan khususnya.

b) Memberikan Dukungan (*supporting agency*)

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (2002) tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, diuraikan bahwa:

”Komite sekolah mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan dan dorongan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal misalnya peningkatan kualitas pendidikan melalui proses belajar mengajar dan eksternal misalnya kegiatan pendidikan disuatu sekolah dengan masyarakat sosial”

Sapari (2003:38) mengemukakan bahwa : Komite sekolah harus dapat mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah baik secara organisasi maupun perorangan.

Sedangkan menurut Ace Suryadi yang dikutip oleh Hasbullah (2006:97), menyebutkan beberapa indikator dari tugas komite sekolah dalam memberikan dukungan (*supporting agency*), yaitu :

- a. Dukungan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan (SDM)
 - 1) Tenaga kependidikan (guru dan non guru)
 - a) Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah
 - b) Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah
 - c) Mobilisasi tenaga kependidikan non guru di sekolah.

- 2) Siswa
 - a) Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
 - b) Mendorong untuk meningkatkan penelitian dikalangan siswa dengan pembentukan kelompok ilmiah remaja (KIR)
 - c) Mencari bantuan dana untuk keringanan biaya pendidikan bagi siswa dari kalangan menengah ke bawah
 - d) Mencari bantuan dana untuk beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
- b. Dukungan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu dengan menghimpun bantuan sarana dan prasarana sekolah, yang mana bantuan tersebut bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat.
- c. Dukungan terhadap pengelolaan anggaran
 1. Menghimpun dan menggali sumber dana, yang bisa didapatkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, pengusaha, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, dan alumni
 2. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa pada tugas dan fungsi komite sekolah aspek dukungan dan dorongan lebih terfokus dukungan financial dan dukungan dalam melengkapi dan memperbaiki sarana sekolah.

c) Melakukan Pengontrolan (*controlling agency*)

Menurut Ace Suryadi yang dikutip oleh Hasbullah (2006:98), menyebutkan beberapa indikator dari tugas komite sekolah dalam memberikan pengontrolan (*controlling agency*), yaitu :

- a. Mengontrol Perencanaan Pendidikan di Sekolah, yang meliputi
Sumber daya pendidikan :
 - 1) Sumber daya manusia (tenaga kependidikan), yaitu dengan pemantauan terhadap kinerja guru dan pegawai/tenaga pendukung
 - 2) RAPBS, yaitu dengan memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah.
- b. Memantau Pelaksanaan Program dan Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan
 - 1) Kurikulum
 - a. Memantau pelaksanaan pembelajaran
 - b. Evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran
 - 2) Ketenagaan, yaitu penilaian terhadap kinerja guru dan pegawai /tenaga pendukung
 - 3) Sarana dan prasarana, yaitu mengontrol penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah
 - 4) Keuangan, yaitu mengawasi keuangan sekolah secara berkala dan berkesinambungan
 - 5) Kesiswaan, yaitu memantau hasil belajar/prestasi siswa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengontrolan merupakan proses kegiatan dalam mengamati/memantau, menilai dan kalau perlu melakukan tindakan koreksi, sehingga semua kegiatan dalam organisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi komite sekolah, pengontrolan ini adalah pengontrolan seperti membantu sekolah mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan program, dan melaksanakan pengontrolan penyelenggaraan program.

d) Menjadi Mediator (*mediator agency*)

Komite sekolah mempunyai tugas sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan peranan pemerintah secara maksimal dan peranan masyarakat terhadap kepeduliannya pada dunia pendidikan.

Secara sadar di akui bahwa penyelenggaraan sekolah yang baik dan efektif adalah melibatkan seluruh unsur *stakeholders* sekolah yang bersangkutan. Sinergi dan kolaborasi segenap *stakeholders* tersebut akan sangat membantu pencapaian prestasi dan peningkatan mutu sekolah. Oleh karena itu, keberadaan komite sekolah menjadi sangat strategis dalam rangka menjembatani antara masyarakat dan pihak sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka:

“Komite sekolah harus dapat menjalankan peran/ tugas dan fungsinya dengan baik dan seoptimal mungkin. Peran sentral dan strategis dari komite sekolah adalah menggalang kepedulian dan peran serta aktif orang tua untuk membantu secara moril dan material atas penyelenggaraan sekolah. Melalui aktivitas inilah maka keberadaan komite sekolah memiliki makna dan fungsi”.

Masyarakat memiliki peran dalam urusan pendidikan, seperti yang tertuang dalam pasal 188 (2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, peran serta masyarakat telah dirumuskan sebagai berikut. Masyarakat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai peran dalam bentuk :

- 1) Penyediaan sumber daya pendidikan
- 2) Penyelenggaraan satuan pendidikan
- 3) Penggunaan hasil pendidikan
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan
- 5) Pengawasan pengelolaan pendidikan
- 6) Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya, dan/atau
- 7) Pemberian fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Suhardi (2009), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam penggalangan peran serta aktif Orang Tua/Wali Siswa, yaitu:

- a) Penyampaian rencana anggaran program kerja sekolah
Dalam kegiatan ini Komite Sekolah secara profesional dan proporsional mengajak orang tua/wali murid memikirkan dan membantu biaya penyelenggaraan pendidikan. Asas keadilan, kelayakan, kesempatan, dan subsidi silang sangat diperhatikan dan dikedepankan. Prinsip dasar yang sangat dipegang teguh dalam kegiatan ini adalah dalam kegiatan ini semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan bersama.
- b) Pertemuan rutin/regular pengurus Komite
Dalam rangka koordinasi antar pengurus untuk menyamakan visi dan persepsi maka dilakukan pertemuan regular per 2 bulan, serta pertemuan tahunan dalam rangka rapat kerja komite sekolah.
- c) Pemberdayaan orang tua peduli/donatur
Menyadari bahwa orang tua/wali murid memiliki potensi yang beragam maka pihak komite merangkul orang tua dari berbagai spektrum dimulai dari kalangan profesi sampai donatur. Potensi ini sangat membantu pengembangan sekolah.
- d) Pemberdayaan Alumni
Rasa kebanggaan almamater yang tinggi dan positif sangat membantu pengembangan sekolah. Pihak komite selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan alumni, yaitu melalui Pengurus Lintas Alumni, dan pengurus alumni per angkatan.
- e) Komunikasi Lintas Sektor
Menyadari bahwa keberadaan sekolah selalu berinteraksi dengan berbagai pihak, maka pihak komite pun berusaha menjembatani hubungan dan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait.

Menurut Ace Suryadi yang dikutip oleh Hasbullah (2006:98), menyebutkan beberapa indikator dari tugas komite sekolah dalam menjadi mediator (*mediator agency*), yaitu :

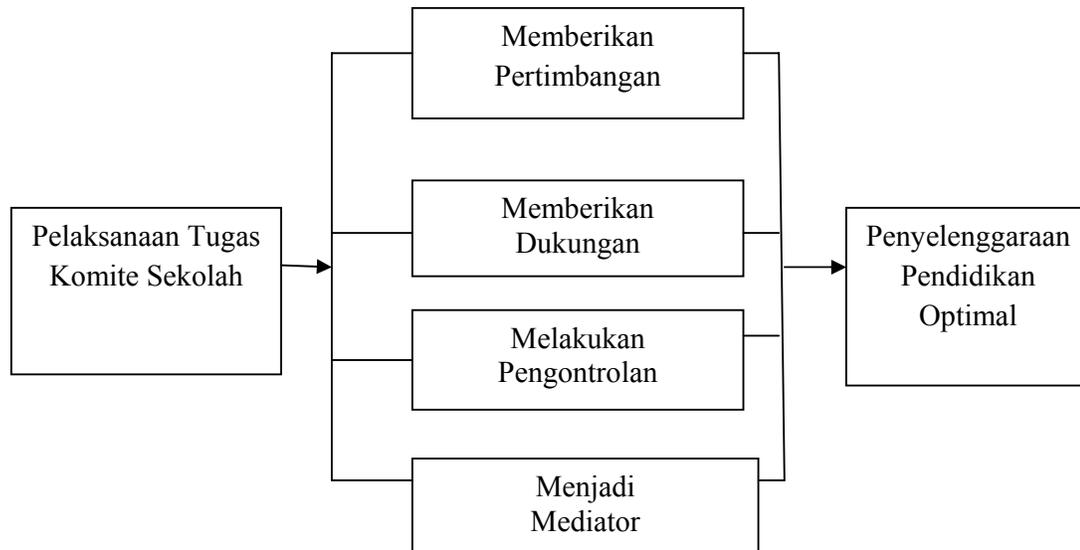
- a. Mediator dalam perencanaan sekolah
 - 1) Menjadi penghubung antara sekolah dengan stakeholder pendidikan
 - a. Membina hubungan dan kerja sama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan dengan DUDI
 - b. Bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni
- b. Mediator dalam pelaksanaan program sekolah dan pengelolaan sumber daya pendidikan
 - 1) Menjadi fasilitator dalam mengkomunikasikan program sekolah
 - a. Mensosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah kepada masyarakat
 - b. Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah
 - c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan
 - d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas komite sekolah dalam mediator adalah menjadi mediator atau jembatan antara sekolah dan masyarakat, serta antara sekolah dengan orang tua/wali murid.

B. Kerangka Pikir

Seperti yang telah diuraikan pada BAB terdahulu, bahwa masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas komite Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang. Adapun tugas komite sekolah tersebut adalah memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengontrolan, dan menjadi mediator. Dari keempat tugas itu, nantinya akan memberi sumbangan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini dapat dilihat pada kerangka konseptual di bawah ini :



Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya mengenai pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam memberikan pertimbangan (*advisory agency*) berkategori baik
2. Pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam memberikan dukungan (*supporting agency*) berkategori baik
3. Pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam melakukan pengontrolan (*controlling agency*) berkategori baik
4. Pelaksanaan tugas komite sekolah pada SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang dalam menjadi mediator (*mediator agency*) dalam kategori baik
5. Secara keseluruhan, Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen Kota Padang berkategori baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, untuk dapat memantau dan memastikan komite sekolah berperan dan menjalankan fungsi dengan transparan, yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja dan tata cara pemilihan pengurus Komite Sekolah
2. Pengawas Pendidikan untuk terus mengawasi jalannya tugas komite sekolah agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yaitu dengan memberi penilaian dan tindak lanjut terhadap kinerja kebijakan dan program sekolah, karena apabila kinerja sekolahnya bagus itu berarti mutu dan kualitas sekolahnya bagus, tetapi apabila sebaliknya kinerja kebijakan dan program sekolahnya jelek itu berarti mutu dan kualitas sekolahnya juga jelek, dan itu semua dikarenakan oleh pihak-pihak yang terlibat yang memanager sekolah tersebut, termasuk pihak komite sekolah
3. Komite sekolah seharusnya menjadi pengawas terdepan untuk mengawal jalannya pendidikan dan memberdayakan sekolah, karena komite sekolah merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu seharusnya komite sekolah mencerminkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan. Karena, komite sekolah itu tidak dibentuk atas dasar formalitas belaka, melainkan untuk pemberdayaan sekolah, memberi masukan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan

4. Kepala Sekolah untuk tetap menjalin kerja sama yang baik dengan komite sekolah, karena peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tidak akan dapat tercapai jika sekolah tidak bekerja sama dengan masyarakat/*stakeholders* yang di jembatani oleh keberadaan komite sekolah
5. Penulis menyarankan kepada peneliti lanjutan untuk menelaah serta meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas komite sekolah ini dengan tempat penelitian berbeda sehingga dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti-peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sapari. (2003). *Peranan Komite Sekolah*. Jakarta : Depdiknas
- Akbar, Raisul. (2010). *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. (online : [pascasarjana.doc](#), di akses tanggal 5 Maret 2011)
- Arikunto. Suharsimi. (2003). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Buletin Komite SMA. (2007). *Apa dan Bagaimana Komite Sekolah* (online : [/home/sman1lmi/public_html/front.php](#), di akses tanggal 14 Februari 2011)
- Fattah, Nanang. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : CV Pustaka Bani Quraisy
- Hartono, Rahmat Mulyo. (2010). *Apa tugas dan fungsi komite sekolah ?*. Padang : Majalah Komunitas. (online : <http://sdnadis1jogja.com>, di akses tanggal 12 September 2010)
- Hasanah, Iffah Noor. (2008). *Sekolah Hendaknya Melibatkan Komite Sekolah*. (online : henny-fmh.blogspot.com/2011/05, di akses tanggal 12 September 2010)
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/II/2002* Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. (2002). Jakarta : Depdiknas
- Ngadino. (2009). *Optimalisasi Peran Komite Sekolah*. (online : etd.eprints.ums.ac.id/7003, di akses tanggal 12 September 2010)
- Nurkolis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Opini Pendidikan. (2007). *Menggugat Keberadaan Komite Sekolah*. (online : rosi-atmaja.blogspot.com/2010/07, di akses tanggal 12 September 2010)
- (2007). *Kapan Orang Tua Merasa Bersekolah di Komite Sekolah dan Terdidik di Dewan Pendidikan ?* (online : rosi-atmaja.blogspot.com/2010/07, di akses tanggal 12 September 2010)